

mulut dari sebab-sebabnya sampai bentuk penyelesaiannya. Mereka sudah mendapatkan amnesti dan abolisi. Tapi ketika Orde Lama mereka malah dijebloskan dalam penjara, termasuk orang-orang yang tidak berontak dari kalangan lain seperti Soetan Sjahrir, Mughtar Lubis, Subadio Sastrosatomo, Anak Agung Gede Agung dan beberapa tokoh lainnya.

Bagaimana upaya kita untuk meng-counter isu tadi?

Saya kira masyarakat sekarang ini makin lama makin kritis dan dapat menilai ulang sejarah. Sekarang ini, terus terang kalau dilihat dari sisi negatif memang ada semacam permanen issue, isu yang dipermanenkan seperti ekstrim kanan, fundamentalis. Kita sudah kenyang dengan itu.

Nah, sekarang dalam bentuk lain direkayasa lebih sempurna, umpamanya karena sekarang mungkin menyebut ekstrim kanan sudah kurang laku, maka sekarang muncul istilah primordialis, sektarian. Jadi saya rasa ada isu-isu yang dipermanenkan dengan maksud-maksud tertentu terus menerus ingin memojokkan ummat Islam.

Inilah sebabnya, kalau itu datang dari kelompok yang memang kita ketahui ingin menghambat gerakan da'wah yang nampaknya makin marak, itu wajar saja. Tapi kalau itu datang dari ikhwan seiman, saya berharap untuk muhasabah, introspeksi. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan bekerja lebih baik menghadapi mengantisipasi tantangan-tantangan ummat sekarang ini.

Selain kemungkinan kecemburuan tadi, ada nggak latar belakang lain sehingga takut pada bayang-bayang Masyumi?

Begini ya, kadang-kadang saya sering merasa lucu juga dengan beberapa tulisan, termasuk tulisan seorang dokter dari Surabaya. Saya tidak keberatan tiba-tiba ia menjadi pembela gigih ormas tertentu, tapi kalau dia menyebut Muslimin Indonesia sebagai organisasi papan nama, saya rasa sangatlah tidak adil.

Sebaiknya dia juga membaca dulu hasil-hasil Pemilu 1955. Memang waktu itu belum ada Muslimin Indonesia, yang ada Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Kemudian Muslimin Indonesia sendiri tahun 1971 dalam keadaan dibajak tokoh masih berhasil sekian puluh kursi. Itu kan tidak bisa dikatakan papan nama. Saya rasa harus adil jugalah.

Karena Masyumi itu sudah menyejarah, dan tokoh-tokohnya merupakan tokoh utama dalam membangun republik ini. Saya rasa sulit untuk menghapus Masyumi dalam konteks sejarah ini. Orang boleh suka atau tidak suka kepada Natsir, tetapi menghapus Natsir dari peta politik dan revolusi Indonesia, saya rasa hanya orang yang tidak jujur saja.

Ada suatu anekdot. Ada seorang tokoh dari Indonesia menghadiri pertemuan internasional di Pakistan bertemu dengan Dr Inamullah Khan. Lalu Inamullah sebagai sekjen (Liga Muslim Sedunia) bertanya kepada tokoh itu, bagaimana tentang kesekatan pak Natsir.

Si tokoh ini, karena begitu takutnya untuk menyebut kenal Natsir, ia mengatakannya tidak kenal. Justru yang kaget adalah Inamullah Khan. "Anda dari Indonesia, anda tidak kenal Natsir. Oh berarti sepenggal sejarah penting Republik Indonesia negeri anda, anda tidak kenal". ■BS

MEREKA Mengingatkan Perpecahan

Mengapa ada pihak-pihak yang tidak jemu-jemu melontarkan isu memecah belah bangsa? Percakapan khusus dengan **Dr. Happy Bone Zulkarnaen**, Ketua HIPIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial), dan pembantu dekan pada FISIP Universitas Katolik Parahyangan menguraikan masalah tersebut. Kolumnis ini ditemui RISALAH di Bandung, 22 Oktober lalu.

Bagaimana tanggapan anda terhadap maraknya isu-isu yang menyebutkan munculnya gejala Neo-Masyumi, suatu gerakan politik yang memperjuangkan Islamisasi?

Isyu-isu seperti itu timbul karena melihat kondisi politik Indonesia, sejak legislatif dipenuhi oleh orang-orang Islam. Dari sana muncullah istilah ijo royo-royo. Kemudian adanya fenomena berdiri dan berkiprahnya ICMI, dan gejala-gejala lainnya.

Dari keadaan seperti itu, muncullah kecurigaan pihak-pihak tertentu yang menghembuskan isyu-isu ijo royo-royo, dan sebagainya. Ditambah pula dengan dilihat secara simbolik pada kondisi politik masa lalu seperti Masyumi.

Dari mana sebetulnya timbulnya tuduhan-tuduhan itu?

Isyu-isu ini adalah opini yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak suka pada perkembangan politik sekarang ini, yang banyak menguntungkan ummat Islam. Jadi sebetulnya bukan indikasi adanya Neo-Masyumi.

Kondisi yang banyak memunculkan nilai-nilai keislaman seperti sekarang ini disebabkan oleh kondisi yang muncul dari masyarakat Islam yang mayoritas di negeri ini. Dan, itu suatu kewajiban bila sebuah masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Jadi sebutan apa sebetulnya untuk menyebut kondisi seperti sekarang ini?

Menurut saya, kondisi seperti ini bukanlah karena adanya



satu gerakan Islam yang pengembangannya tidak lagi didasarkan pada primordialisme keislaman atau kepartaian, tetapi mengarah pada bagaimana menampilkan Islam di pentas permasalahan nasional seperti masalah keadilan, kesejahteraan rakyat, kemiskinan penduduk, dsb.

Jadi bagaimana sebetulnya posisi tuduhan-tuduhan itu?

Itu semacam kecemburuan sekaligus kekhawatiran jang-jangan kesempatan umat Islam di pemerintahan Indonesia itu dijadikan untuk kepentingan primordialisme. Tuduhan itu tidak realistis, sebab dengan tuduhan itu seakan-akan keberadaan Islam itu harus dicurigai.

Padahal, semua yang mereka (umat Islam) perjuangkan itu sebetulnya untuk kepentingan nasional. Dan itu sebuah prestasi dalam meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Jadi, apa sebetulnya yang harus dikembangkan dalam perkembangan politik di Indonesia ini?

Yang perlu dikibarkan dan diisyukan sekarang ini adalah *fair political play*, yaitu kegiatan atau persaingan politik yang lebih fair. Dan, *clean political play* (permainan politik yang bersih). Itu kan pendukung adanya *clean government* (pemerintahan yang bersih) yang dicita-citakan.

Itulah sebetulnya yang saat sekarang ini diperlukan. Bukan malah menghembuskan isu-isu kecurigaan yang dilandasi dengan kecemburuan seperti isu adanya Masyumi Baru. Isyu-isyu seperti itulah yang sebetulnya dapat menjadi faktor pemecah belah. Dengan demikian, isu itu timbul dari orang-orang yang menginginkan perpecahan.

Jadi, selama masih berkepentingan nasional, walaupun datangnya dari mana saja dapat diterima. Jelasnya, semua golongan itu sebetulnya mendapat tempat yang sama jika sudah menyangkut permasalahan nasional.

Dan, jika dibanding-bandingkan dulu dan sekarang, dulu persaingan politik atas nama primordial itu wajar karena dulu sistemnya parlementer dengan mengembangkan *multi party system* (sistem banyak partai). Tetapi sekarang, kita menganut sistem presidensiil yang tidak mengembangkan sistem multi partai itu. Dan yang penting sekarang adalah memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa, bukan masanya lagi untuk gontok-gontokan yang dapat merugikan kita semua. ■MT

gerakan politik yang disebut-sebut dengan Neo-Masyumi. Tetapi hal ini adalah sebuah gerakan Islam kultural. Jadi di Indonesia telah terjadi perubahan metode perjuangan umat Islam, dari gerakan politik ke gerakan kultural.

Dan, gerakan kultural itu adalah

NATSIR, Masyumi dan Ideologisasi Islam

Berbicara tentang Masyumi, sulit memisahkannya dengan Mohammad Natsir, mengingat ijhtihad politiknya yang banyak mewarnai partai Islam yang dikenal gigih anti Komunis itu. Inilah catatan **Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH**, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang tengah menyelesaikan bukunya tentang Masyumi yang bubar pada zaman kejayaan Orde Lama.

IDEOLOGISASI terhadap asas-asas doktrin keagamaan Islam yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan politik, membawa Natsir untuk mempertemukan antara Islam dengan paham demokrasi liberal yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Pandangannya mengenai demokrasi ini menunjukkan adanya perkembangan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan kejayaannya bahwa negara pada prinsipnya adalah "alat" untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh agama, Natsir berpendapat tidak ada suatu model tertentu yang bersifat "baku" mengenai sebuah negara sebagaimana dikehendaki oleh Islam.

Kaum Muslimin yang hidup pada sesuatu zaman dan tempat tertentu di dunia ini, bebas untuk menyusun negara mereka sendiri menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka pun berhak untuk mencontoh berbagai sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain, meskipun mereka bukan bangsa Muslim.